

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang “Kepentingan Amerika Serikat dalam Program Bantuan USAID di Indonesia dalam Perubahan UU Migas No. 8 Tahun 1971 Menjadi UU No. 22 Tahun 2001”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data sekunder, serta di dukung dengan pendekatan yang relevan yaitu teori pembuatan kebijakan luar negeri dan teori kepentingan nasional.

Perubahan UU No. 8 tahun 1971 menjadi UU No. 22 tahun 2001 menunjukkan adanya kepentingan Amerika Serikat yaitu kepentingan untuk mengakomodasi kelompok kepentingan. Keberadaan Amerika Serikat sebagai negara demokrasi memiliki karakter dalam pembuatan kebijakan yaitu pertimbangan - pertimbangan dalam agregasi kebijakan yang harus dapat mengakomodasi kelompok kepentingan partai politik, hingga kelompok kapitalis dan industri. Entitas ekonomi - politik Amerika Serikat ini kemudian berupaya menjadikan sistem pengelolaan energi di Indonesia ke arah liberalisme sehingga dapat mendukung pencapaian kepentingan nasional Amerika Serikat dalam jangka panjang.

Kepentingan Amerika Serikat melalui USAID dalam perubahan UU No. 8 tahun 1971 menjadi UU No. 22 tahun 2001 adalah untuk memperkuat kapasitas ekonomi - politik dan *energy security*. Amerika Serikat merupakan negara industri yang sangat tergantung pada energi minyak bumi. Sejak lama Amerika Serikat sangat tergantung produksi minyak dunia, sehingga negara ini berupaya menjalankan berbagai strategi, termasuk standar ganda di wilayah Timur - Tengah yang selama ini berperan sebagai penyuplai utama kebutuhan minyak Amerika Serikat. Ketika wilayah ini mengalami ketegangan ekonomi dan konflik maka Amerika Serikat akan mencari wilayah yang tetap dapat mendukung ketersediaan energi, diantaranya adalah Indonesia. Kepentingan Amerika Serikat melalui program bantuan USAID terhadap perubahan Undang - undang Migas No. 8 Tahun 1971 menjadi No. 22 Tahun 2001 ini selengkapnya akan dibahas pada penelitian ini.

Kata Kunci: Amerika Serikat, IMF , Indonesia, USAID, UU No. 8 tahun 1971 dan UU No. 22 tahun 2001.

**UNITED STATES INTERESTS ON USAID ASSISTANCE PROGRAM IN
INDONESIA OF AMENDMENT THE OIL AND GAS LAW
NO. 8 OF 1971 BECOMING LAW NO. 22 OF 2001**

ABSTRACT

This thesis discusses " United States Interests on Usaid Assistance Program in Indonesia of Amendment The Oil And Gas Law No. 8 of 1971 Becoming Law No. 22 of 2001". This study uses qualitative research methods with secondary data collection techniques, and it is supported by relevant approaches namely foreign policy making theory and national interest theory.

Amendment The Oil And Gas Law No. 8 of 1971 Becoming Law No. 22 of 2001 shows the interests of the United States, namely the interests to accommodate interest groups. The existence of the United States as a democratic country has a character in policy making, namely considerations in policy aggregation that must be able to accommodate the interests of political parties, to capitalist and industrial groups. The United States economic - political entity then attempts to make the energy management system in Indonesia towards liberalism so that it can support the achievement of the United States national interests in the long term.

United States interests through USAID in the amendment of Law No. 8 of 1971 became Law No. 22 of 2001 is to strengthen economic - political capacity and energy security. The United States is an industrial country that is highly dependent on petroleum energy. The United States has long been dependent on world oil production, so the country is trying to implement a variety of strategies, including double standards in the Middle East region which have been the main supplier of US oil needs. When this region experiences economic tensions and conflict, the United States will look for areas that can still support energy availability, including Indonesia. United States interests through USAID assistance program to amend the Oil and Gas Law No. 8 of 1971 became No. 22 of 2001 will be fully discussed in this thesis.

Keywords: United States, IMF, Indonesia, USAID, UU No. 8 of 1971 and UU No. 22 of 2001.